

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aartje Tehupeiory. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Raih Asa Sukses. Depok.
- Andrian Sutedi. (2006). *Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-undang Pokok Agraria*. Cipta Jaya. Jakarta.
- Anisitus Amanat. (2003). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Budi Harsono. (1982). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA*. Djambatan. Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Djoko Prakosa dan Budiman Adi Purwanto. (1985). *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Elza Syarief. (2020) *Praktik peradilan perdata: teknis dan kiat menangani perkara di pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Frans Hendra Winata. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harsono. (1982). *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Djambatan. Jakarta.
- Hyronimus Rhiti. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Atma Jaya. Yogyakarta

- Idris Zainal. (1983). *Ketentuan Jual Beli Menurut Hukum Perdata*. Fakultas Hukum USU. Medan
- John M. Echols dan Hasan Shedily. (1995). *Kamus Bahasa Indonesia-Inggris*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Joni Emirzon. (2000). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ernawati Waridah (2002). *Kamus Bahasa Indonesia*. Bmedia. Jakarta
- Kartasapoetra, G. (1992). *Masalah Pertanahan di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lebacqz, K. (2015). *Teori-Teori Keadilan : Six Theories of Justice*. Nusa Media. Bandung.
- Maria. SW.Sumardjono. (2008). *Tanah : Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Kencana. Jakarta.
- Muhammad Yamin Lubis. (2008). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Mandar Maju. Bandung.
- Nurnaningsih Amriani. (2012). *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Priyatna Abdulrasyid. (2002). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Fika Hati Aneska. Jakarta.
- Prof.Dr.Nurhasan Ismail, S. H. , M. H. (2018). *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*. Setara Press. Malang.

- Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Rusmadi Murad. (1999). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Alumni.Bandung
- Salim. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*., Pustaka Reska Cipta. Bandung.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soebekti R. (1975). *Pembinaan Hukum Nasional*. Alumni. Bandung.
- Sumarto. (2012). *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-win Solution*. Badan Pertanahan Nasional RI. Jakarta.
- Syarief, E. (2014). *Pensetifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Jakarta.
- Urip Santoso. (2017). *Hukum Agraria : Kajian Komperhensif*. Prenada Media. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. (1962). *Hukum Warisan Di Indonesia*.IS Gravennage Vorkink van Hove, Bandung.
- Yudhi Setiawan. (2009). *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-4 (Empat).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Permintaan Bantuan Eksekusi

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri

C. Jurnal

Abon, M. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(3), 64–75.

- Adont, S., Syarifuddin, L., & Al Hidayah, R. (2018). Kontradiksi Antara Keputusan Hakim dan Hukum Ketentuan Mengenai Kedudukan Ahli Waris dalam Pembuktian Hak Atas Tanah. *Jurnal Mulawarman Law Review*, 3(2), 133–148.
- Ahyar A, (2018). Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 289.
- Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawl, *Jurnal TAPIS*, 9(2).
- Dedy Mulyana, Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2)
- Dian Aries Mujburohman, (2021). Legilasi Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendom, *Jurnal Komisi Yudisial*, 4(1).
- Diva Sukmawati, (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2)
- Estevina Pangemanan, (2013). Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah, *Jurnal Lex Privatum*, 1(04).
- Fadhilah (2012). Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan, *Jurnal Kybernan*, 3(1)
- Fakhrizal, N. A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Memperoleh Warisan Tanah Absentee. *Jurnal Perspektif*, 22(3), 248–257.

- Ferry Susanto Limbong. (2023). Penyebab Terjadinya Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Kuhp Dan Undang-Undang Pokok Agraria, *Universitas Dharmawangsa*,17(2)
- I Gde Suranaya Pandit. (2016). Public Inspiration Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, *Jurnal Administrasi Publik*. 1(1)
- Jhon A Mebri, (2017). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum, *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 69.
- Kadek Hapsari Ika Palupi, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya. (2020). Kedudukan Hak Atas Tanah Waris Warga Negara Indonesia Yang Berpindah Kewarganegaraan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1).
- Keadilan, P., & Santoso, H. A. (2021). *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB"*, *Jatiswara* 36(3).
- Naskur, (2008). Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2).
- Prabowo, S., Sudirman, M., & Tondy, C. J. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 63–70.
- Ramzi Farhan, (2021). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Dengan Hak Eigendom (Studi Kasus Sengketa Yang Melibatkan Ahli Waris Keluarga Am Dan PT. PJ), *Jurnal Indonesian Notary*, 3(38).
- Siti Maghfirotn Ni'mah, (2019). Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam, *Media Luris*, 2(2).

- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226.
- Wuisan, E. N. (2016). Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan Yang di Kuasai Oleh Ahli Waris Yang Bersengketa. *Jurnal Lex Crimen*, 5(6), 63–70.
- Zudan, A., & Fakrulloh, S. H. (2005). Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. *In Jurisprudence*, 2(1).

D. Repository

- Elma. R. *Diskriminasi Penegakan Hukum Penanganan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Aspek Pidana Dan Pelanggaran Asas Equality Before The Law*, UIN Sumatera Utara, 2022.
- Annisa. N. *Gugatan Pihak Ke-3 Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian Bot Antara Pemerintah Daerah kabupaten Bandung Barat Dengan PT Bangun Bina Persada Dikaji Dari Hukum Positif*, Universitas Pasundan, 2023.
- Sofia. M. *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Pacuan Kuda Antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Dengan Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Agraria*, Universitas Pasundan, 2023.